

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djoko Sumaryanto, *Perspektif Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Diakses tanggal 1 Februari 2019.
- Abd. Mukhid, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif*, Surabaya : CV. Jakas Media Publishing, 2021
- Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan demon Data Kontemporer* (Jakarta: LP3ES, 1982)
- Ali, Achmad, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: BPIBLAM, 1998)
- Ali, M. Hatta. *Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan : Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung : Alumni, 2012.
- Arief, Barda Nawawi, “Mediasi Pidana (Penal Mediation) dalam Penyelesaian Sengketa/ Masalah Perbankan Beraspek Pidana di Luar Pengadilan,” in *Kapita Selekta Hukum: Menyambut Dies Natalis Ke-50 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007), hal. 17
- Arliman. S, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2015
- Atmadja, Arifin P. Soeria. *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*. Bandung : Mujahid Press, 2014.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2013
- B. Arief Sidharta, *Pembentukan Hukum di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Rapat Kerja Panitia Khusus DPR RI Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para Pakar (Jakarta, 2011)
- Bank, Word, *Memerangi Korupsi di Indonesia, Memperkuat Akuntabilitas untuk Kemajuan* (Jakarta, 2004)
- Bentham, Jeremy. *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana (The Theory of Legislation)*, diterjemahkan oleh Nurhadi M.A. Bandung: Penerbit Nuasa, 2016.
- Blacks's Law Dictionary*. Minnesota: West Publishing Co, 1990.

- BPHN Kemenkumham, *Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Jakarta : BPHN, 2015
- Budiah, H. ; D. D. M. & J. T. S. (2019). Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal IUSTITIA OMNIBUS*, 1(1), 1–17.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017.
- Chris Mitchell, dalam Simon Fisher et. al., *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak* (Jakarta: The British Council Indonesia, 1998)
- Christianata. (2020). Pengenyampingan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya Terhadap Kasus Kerugian Uang Negara Dibawah Rp. 50.000.000,-. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 201–211.
- Cole, George F., Christopher E. Smith, & Christina De Jong. *The American System of Criminal Justice*. Boston: Cengage Learning, 2017.
- Deklarasi Bangkok, ““We recognize that comprehensive and effective crime prevention strategies can significantly reduce crime and victimization. We urge that such strategies address the root causes and risk factors of crime and victimization and that they be further developed” (Bangkok), hal. Butir 10
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Kencana, 2017
- Didin S. Damanhuri, “Jimly Asshiddiqie dalam kata pengantar buku Didin S. Damanhuri, *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*,” in *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hal. XI
- Dylan Aprialdo Rachman, ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi pada 2018 Capai Rp9,289 , diakses tanggal 1 Februari 2019.
- Dylan Aprialdo Rachman, *Kabareskrim: Anggaran Penyidikan Kasus Korupsi Lebih Besar daripada Kerugian Negara*, , diakses tanggal 1 Februari 2019.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group, 2018
- Elliot, Lihat Kimberly Ann, *Corruption and The Global Economy*, ed. oleh Yayasan Obor Indonesia, Terjemahan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999)

- Faal, M. (1991). *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013
- G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology* (Holland: Cluwer Deventer, 1973)
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2015
- Habib, A. (2020). Application of Restorative Justice in Corruption Crime Cases as an Effort to Repay State Losses. *Corruptio*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2069>
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi., RM. Surachman. *Pre-Trial Justice: Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Harahap, M. Y. (2017). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.
- Hendry Campbell, *Black's Law Dictionary* (New York: Minn West Publishing Co, 1990) Indonesia, CNN, "Calon Kajati Singgung
- Hiariej, E. O. S. (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hukumonline.com, *Mau Tahu Biaya Penanganan Perkara Korupsi? Simak Angka dan Masalahnya*, diakses tanggal 1 Februari 2020.
- Indonesia Corruption Watch. *Hasil Penelitian Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : ICW, 2014.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 140, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3874
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 5, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4355
- Irman, Tubagus. *Money Laundering : Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2017.

- Ismayani,Ade, *Metodologi Penelitian*, Aceh : Syiah Kuala University Press, 2019
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Bahan Kuliah: Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Jeremy Bentham, Teori Perundang-undangan, Prinsip-Prinsip Hukum Perdata dan Hukum Pidana, (The Theory of Legislation), ed. oleh MA Nurhadi (Bandung: Nusamedia, 2010)
- Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020
- Kartika, P. P., Subianto, A. D., & Iswara, I. M. A. M. (2019). Politik Hukum Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 1(2), 263–279.
- Kasiyanto, Agus .*Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta : Kencana, 2018
- Keadilan Restoratif untuk Korupsi Kecil,” 2020 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201104191211-12-565995/calon-kajati-singgung-keadilan-restoratif-untuk-korupsi-kecil>>
- Kholis, Efi Laila, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Solusi Publising, 2010.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019.
- Latif, Abdul, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Latif, Abdul. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Leonard, Liam (ed), *The Sustainable Nation : Politics, Economy and Justice, Advance in Sustainability And Environmental Justice Volume 21*, Howard House – Wagone Lane, UK : Emerald Publishing Limited, 2018.
- Liebmann, M. (2007). *Restorative Justice: How It Works*. Jessica Kingsley Publisher.
- M. Ahsan Ridhoi, Tekan Biaya Penyidikan, Polri: Lebih Baik Kita Cari Kasus Besar, , diakses tanggal 2 Februari 2020.

- Makarao, M. T. (2013). Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak. In BPHN Kemenkumham RI. [https://bphn.go.id/data/documents/laporan\\_akhir\\_pengkajian\\_restorative\\_justice\\_anak.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf)
- Mamitova, N.V. “Problems of Countering Corruption Crimes in the Russian Federation”, *Criminological Journal of the Baikal State University of Economics and Law*, Vol.10, No.2, 2016
- Mamudji, Sri, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marsita, B.D. Sri dan Sri Humana, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Nilai Kerugian Keuangan Negaraanya Kecil :Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Martin Wright sebagaimana dikutip oleh Marc Groenhuijsen hal. 1., “Victim-Offender- Mediation: Lagal And Procedural Safeguards Experiments And Legislation In Some European Jurisdictions,” in Victim-Offender- Mediation: Lagal And Procedural Safeguards Experiments And Legislation In Some European Jurisdictions (Leuven, 1999), hal. 1
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia, 2005.
- Mas, Marwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Miles, Helen and Peter Raynor, *Reintegrative Justice in Practice : The Informal Management of Crime in an Island Community*, New York : Routledge, 2016,
- Muchlis, A. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 341–370. <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v10no2.652>
- Muhadjir, Noeng. *Filsafat Ilmu dan Filsafat Empirisme*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2013

- Muhaimin, "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19 (2), 2019
- Muhaimin, "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.2 (2019), 190  
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.185-206>>
- Mulyana, Asep N., *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Jakarta: Grasindo, 2020
- Mulyani, S. (2017). PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF JUSTICE (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 337. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.337-351>
- N.E. Algra; H.R.W. Gokkel; Saleh Adiwinata, DH; A. Teloeki; H. Burhanoeddin, St. Batoeta, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, 1972
- Narindrani, Fuzi "Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2020, Volume 20, Nomor 4
- Nawawi, Barda, *Strategi Kebijakan Nasional dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, 1998*
- Nelson, Febby Mutiara. *Sistem Peradilan Pidana Dan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*. Depok : Raja Grafindo Persada, 2020.
- Nur Syarifah, *Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, diakses tanggal 2 Februari 2020.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2013
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Pidana Khusus : Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*. Jakarta : Pustaka Kemang, 2016.
- Pemerintah Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN R.I. Tahun 2005 Nomor 140, TLN RI Nomor 4578).
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2000 Nomor 202, TLN RI Nomor 4022).

- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (LN RI Tahun 2000 Nomor 203, TLN RI Nomor 4023).
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LN RI Tahun 2000 Nomor 209, TLN RI Nomor 4027).
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LN RI Tahun 2000 Nomor 210, TLN RI Nomor 4028).
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LN RI Tahun 2005 Nomor 94, TLN RI Nomor 4540).
- Purwaka, Tommy Hendra, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Atma Jaya, 2007
- Purwati, Ani, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2014
- Retno M, Koruptor Kembalikan Kerugian Negara, Penyelidikan Kasus Dihentikan, diakses tanggal 2 Februari 2020.
- Ridwan. *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta : FH UII Press, 2014
- Robert Klitgaard 82-85., *Membasmi Korupsi* (terjemahan), Terjemahan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005)
- Romli dan Kodrat, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta :Kencana, 2016
- RUU KUHP (2015) tercantum dalam Pasal 16 berbunyi “Dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”. (Jakarta, 2015)
- Saragih, Yasmirah Mandasari, *Pengendalian Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara*, Cattleya Darmaya Fortuna, 2021

- Sari, N. M., & Budiana, I. N. (2020). Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(9), 1324. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p03>
- Serebrennikova, Anna V. dan Alexander A. Trefilov, "Criminal Anti-Corruption in the Era of Digital Technologies : The Russian Experience, *Juridiska zinatne/Law*, No.13, 2020, pp.5-14. Doi: <https://doi.org/10.22364/jull.13.01>
- Shavell, Steven, *Foundations of Economic Analysis of Law*, Cambridge, Ma: The Belknap Press Of Harvard University Press, 2004.
- Sheldon S. Steinberg, David T. Austern, *Government, Ethics, and Managers, Penyelewengan Aparat Pemerintahan, Terjemahan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999)*
- Soekanto, Soerjono et al., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali, 1985)*
- Sonny Kusuma, *Restorative Justice (Bukan) untuk Delik Korupsi*, diakses tanggal 2 Februari 2020.
- Sorer Davidsen et al., *Curbing Corruption in Indonesia 2004 - 2006 A Survey of National Policies and Approaches (Menapaki Korupsi di Indonesia 2004 - 2006; Suatu Survei Kebijakan dan Pendekatan Nasional, 1, 1 ed. (Yogyakarta: Kanisius Printing House, 2006)*
- Suarda, I Gede Widhiana, *Pornografi dalam Media Massa Cetak : Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2022
- Subiantoro, Wahyu Danang dan Hari Soeskandi, "Kebijakan Kejaksaan Agung RI Tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi Di Bawah 50 Juta Ditinjau Dari Restorative Justice", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social Political Governance*, Vol.2 No.1, 2022, Doi: <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.147>
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Tulisan ce (Bandung: Alumni, 1986)
- Suhariyanto, B. (2016). *Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara*. *Rechsvinding*,



5(3), 421–438. [http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART 2 JRV 3 NO 2 PROTECT.pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART_2_JRV_3_NO_2_PROTECT.pdf)

Sulantoro, Murpraptono Adhi (2021) "PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA," "*Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 1, Article 26. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/26>

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 Mengenai Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Surat Edaran Jampidsus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan

Surat Kapolri No.Pol.B/3033/XII/2009/sdeops tentang konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).

Syamsudin, Azis. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Tahe, Andrian Pratama, "Kejagung Klaim 5 Tahun Ini Selamatkan Uang Negara Triliunan Rupiah," <https://tirto.id/kejagung-klaim-5-tahun-ini-selamatkan-uang-negara-triliunan-rupiah-egrQ>, 2019

Toegarisman, A. (2016). *Pemberantasan Korupsi Dalam Paradigma Efisiensi*. Kompas.

Toegarisman, M. Adi. *Pemberantasan Korupsi Dalam Paradigma Efisiensi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016.

Tuanakotta, Theodorus M. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Penerbit Salemba 4, 2014.

Tuanakotta, Theodorus M., *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Undang -undang Nomor Nomor 73 Tahun 1958 (LN 58-127) tentang Menyatakan Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Memori Penjelasan Dalam Tambahan LN No.1660).

Undang- undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47, TLN RI Nomor 4286)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (LN RI Tahun 1999 Nomor 75, TLN RI Nomor 3851).

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355).

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 66, TLN RI Nomor 4400)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (LN RI Tahun 2004 Nomor 67, TLN RI Nomor 4401)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R.I (LN RI Tahun 2002 Nomor 2, TLN RI Nomor 4168)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN RI Tahun 2001 Nomor 134, TLN RI Nomor 4149)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (LN RI Tahun 2002 Nomor 137, TLN RI Nomor 4250)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB (UNCAC) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2003

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (LN RI Tahun 2006 Nomor 32, TLN RI Nomor 4620)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (LN RI Tahun 2010 Nomor 122, TLN RI Nomor 5164)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Wagiu, Justisi Devli, dkk., “Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Badan Usaha Milik Negara Yang Merugikan Keuangan Negara”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.9, No. 10, 2022
- Waluyo, B. (2016). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Rajawali Press.
- Waluyo, Bambang, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia* (Jakarta: Gramedia)
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)
- Wolff, Jonathan. *Pengantar Filsafat Politik*, Bandung: Nusa Media, 2013
- Yuliantini, N.P.R., “Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal IKA*, 8(2), 2016
- Yuniar, Angga, “Data ICW: Kerugian Negara Rp39,2 Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Hanya Rp2,3 T,” <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-icw-kerugian-negara-rp392-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-hanya-rp23-t.html>, 2020 <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-icw-kerugian-negara-rp392-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-hanya-rp23-t.html>
- Yusuf, Muhammad. *Kapita Selekta TPPU*. Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2015.
- Yusuf, Muhammad. *Merampas Aset Koruptor*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2013
- Zunaidi, Ahmad Hajar, *Asas Kelayakan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Ringan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2022